



## ANALISIS DISPARITAS TINGKAT HIDUP ANTAR KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

Andi Muhammad hasi<sup>1</sup>  
Baharuddin Semmaila<sup>2</sup>  
Mansur Mejang<sup>3</sup>

Universitas Muslim Indonesia Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia<sup>123</sup>

e\_mail: [am.hasbi@umi.ac.id](mailto:am.hasbi@umi.ac.id)<sup>1</sup>

e\_mail: [baharuddin.semmaila@umi.ac.id](mailto:baharuddin.semmaila@umi.ac.id)<sup>2</sup>

### ABSTRACT

*Study was conducted to (1) Study and formulate the factors that describe the level of life (welfare) society in Regency/City in South Sulawesi, (2) Assess the results of the counting IDTH to District/City in South Sulawesi and (3) Establish life level Disparity Index (IDTH) for District/City of South Sulawesi. This study uses secondary data sources are from the National Socioeconomic Survey (Susenas) 2014, National Labour Force Survey (Sakernas) 2014, Human Development Index (HDI) in 2014 and Macroeconomic Indicators in 2014, all of which obtained from BPS of South Sulawesi Office. Data was analysed by TaksonomiHellwig which produces two components of Disparity Index of Life Level: (1) Pattern of Development and (2) measure of development. The result of this study indicate that the disparity in the level of living districts/cities in South Sulawesi showed discrepancies width to Makassar city as regional reference. This means that the role of South Sulawesi Provincial Government to focus mre on the development of the district/city is left with no prejudice to the district/city that has better in terms of the life or well-being of the region.*

**Keyword: Disparities, Dimension, Variable, Measure of the Development, the Pattern of Development.**

### ABSTRAK

Penelitian dilakukan bertujuan untuk : (1) Mempelajari dan merumuskan faktor-faktor yang menggambarkan tingkat hidup (kesejahteraan) masyarakat di Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan, (2) Mengkaji hasil penghitungan IDTH untuk Kabupaten/Kota se- Sulawesi Selatan dan (3) Membentuk Indeks Disparitas Tingkat Hidup (IDTH) untuk Kabupaten/Kota se- Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan sumber data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2014, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2014, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2014 dan Indikator Ekonomi Makro Tahun 2014 yang kesemuanya diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan. Data di Analisis dengan Metode Taksonomi Hellwig yang menghasilkan dua komponen Indeks Disparitas Tingkat Hidup yaitu : (1) Pola Pembangunan (pattern of development) dan (2) ukuran pembangunan (measure of development). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa disparitas tingkat hidup kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan ketimpangan yang lebar terhadap Kota Makassar sebagai daerah acuan. Hal ini berarti bahwa peran pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

untuk lebih memfokuskan pembangunan kepada kabupaten/kota yang tertinggal dengan tidak mengenyampingkan kabupaten/kota yang sudah lebih baik dalam hal tingkat hidup atau kesejahteraan daerahnya.

**Kata kunci : Disparitas, Dimensi, Variabel, Ukuran Pembangunan, Pola Pembangunan**

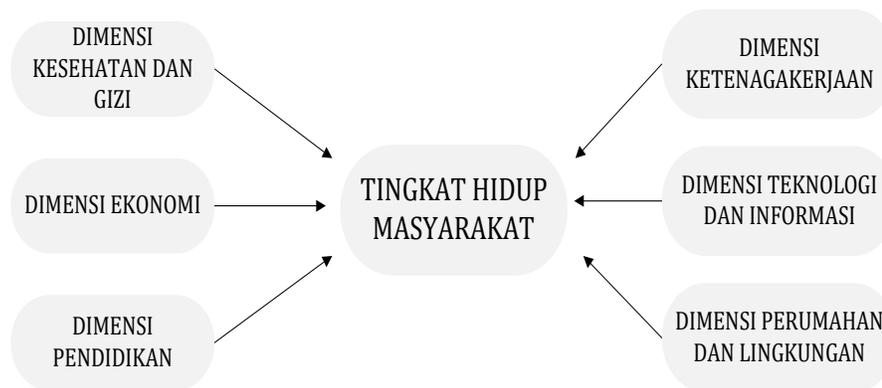
**PENDAHULUAN**

Mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat memang bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Hal ini karena ukuran kesejahteraan memiliki dimensi dan intensitas yang sangat luas. Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi agregat dari kepuasan-kepuasan individu yang ada di dalamnya.

Hingga saat ini, masih relative sedikit indikator statistik yang merupakan proksi untuk mengukur kesejahteraan rakyat. Misalnya, UNDP yang pada tahun 1990 mempelopori penyusunan Indek Pembangunan Manusia (IPM)/*Human Development Index* (HDI) sebagai pendekatan untuk mengukur pencapaian pembangunan yang dititik beratkan pada kesejahteraan manusia. Sejak saat itu, IPM menjadi pusat perhatian berbagai pihak, baik kalangan masyarakat umum, pemerintah, politikus maupun kalangan akademis. IPM menjadi populer karena cara perhitungannya yang sederhana, yaitu hanya merupakan rata-rata dari indicator kesehatan; pendidikan; dan pendapatan, tetap nilai yang dihasilkan sangat berarti bagi pemerintah dalam menterjemahkan pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai.

Dalam penelitian ini akan digunakan Metode Taksonomi Hellwig untuk menghitung Indeks Disparitas Tingkat Hidup (IDTH) antar Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan dengan kerangka pikir penelitian sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Pikir Peneilitian



Dari kerangka pikir di atas, dapat dilihat bahwa tingkat hidup masyarakat di suatu wilayah dipengaruhi oleh beberapa dimensi sosial ekonomi dan budaya seperti: dimensi kesehatan dan gizi; dimensi pendidikan; dimensi ekonomi; dimensi ketenagakerjaan; dimensi perumahan dan lingkungan; dan dimensi teknologi dan informasi. Selanjutnya dalam penelitian ini, variabel pengukur yang akan digunakan dalam menentukan tingkat hidup masyarakat di

suatu Kabupaten/Kota dibatasi dalam beberapa variabel penelitian yang merujuk pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh BPS RI pada tahun 2008 sebagai berikut:

Tabel 1. Variabel-Variabel Dalam Setiap Dimensi

NO.	NAMA VARIABEL	
<b>DIMENSI KESEHATAN DAN GIZI</b>		
1	$X_1$	Angka Harapan Hidup
2	$X_2$	% Balita yang kelahiran Pertama ditolong tenaga medis
<b>DIMENSI PENDIDIKAN</b>		
3	$Y_2$	Rata-rata lama sekolah
4	$Y_3$	% penduduk 10 tahun ke atas yang menamatkan diploma ke atas
5	$Y_4$	Angka Partisipasi Sekolah umur 7-12 tahun
6	$Y_5$	Angka Partisipasi Sekolah umur 13-15 tahun
<b>DIMENSI EKONOMI</b>		
7	$Z_1$	Rata-rata Pengeluaran per kapita sebulan
8	$Z_2$	Pengeluaran per kapita riil disesuaikan
9	$Z_4$	% penduduk di atas garis kemiskinan
10	$Z_5$	% pengeluaran non makanan
<b>DIMENSI KETENAGAKERJAAN</b>		
11	$U_4$	Rata-rata jam kerja buruh/karyawan/pegawai seminggu yang lalu
12	$U_5$	% pekerja sektor formal
13	$U_6$	% pekerja sektor Non Pertanian
<b>DIMENSI PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN</b>		
14	$V_1$	% Rumahtangga yang menggunakan listrik sebagai sumber penerangan
15	$V_2$	% Rumahtangga yang memiliki akses terhadap air bersih
16	$V_3$	% Rumahtangga yang memiliki lantai rumah sebagian besar bukan tanah
17	$V_4$	% Rumahtangga yang memiliki fasilitas buang air besar sendiri
18	$V_5$	% Rumahtangga yang memiliki tangki septik
19	$V_6$	% Rumahtangga dengan luas lantai per kapita > 8 m <sup>2</sup>
20	$V_7$	% Rumahtangga yang memiliki dinding tembok
<b>DIMENSI TEKNOLOGI DAN INFORMASI</b>		
21	$W_1$	% Rumahtangga yang memiliki telpon seluler
22	$W_2$	% Rumahtangga yang memiliki computer (desktop, laptop, notebook)
23	$W_3$	% Rumahtangga yang mengakses internet selama sebulan yang lalu

## METODE

Penelitian ini dilakukan pada level Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan. Atau secara rinci terdiri dari 22 Kabupaten dan 3 Kota. Karena unit penelitian pada level Kabupaten/Kota, maka akan diperoleh Indeks Disparitas Tingkat Hidup Antar Kabupaten/Kota (IDTHAK). Sedangkan untuk peringkat indeks komposit menggunakan Kota Makassar sebagai Kota Acuan/Model. Pemilihan Kota Makassar sebagai model acuan karena pertimbangan bahwa Kota Makassar memiliki banyak keunggulan dibandingkan Kabupaten/Kota yang lainnya, baik itu dalam hal tingkat hidup maupun keadaan perekonomian.

Sumber data yang akan digunakan dalam penyusunan Indeks Disparitas Tingkat Hidup Antar Kabupaten/Kota adalah data Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indikator Ekonomi Makro Provinsi Sulawesi Selatan, hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei

Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) dan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan. Sedangkan untuk tahun data, kami menggunakan data Tahun 2014.

Selanjutnya dalam penelitian ini, metode taksonomik digunakan dengan tujuan untuk menentukan suatu indeks menyeluruh (*composite index*) yang didasarkan atas beberapa variabel yang telah lolos uji validitas dan reliabilitas. Prosedur penghitungan indeks komposit dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Tahap pertama adalah membentuk matrik dasar ( $A$ ) dimana jumlah baris menunjukkan sejumlah  $n$  objek observasi yang diteliti. Sedangkan jumlah kolom merupakan sejumlah  $m$  kumpulan variabel penelitian.
- b. Tahap kedua adalah membuat matriks yang sudah distandarisasi dari matrik dasar ( $A$ ) pada tahap I. Proses standarisasi variabel perlu dilakukan karena biasanya variabel yang digunakan dalam penelitian memiliki ukuran yang tidak sama/tidak sejenis/tidak seragam.
- c. Tahap ketiga adalah menghitung jarak antar objek penelitian ( $1,2,3, \dots, n$ ) untuk setiap variabel yang diteliti dan membentuk isin-isian tersebut dalam bentuk matrik.
- d. Tahap keempat adalah membuat Matriks Jarak (distance matrix) yaitu matriks simetris yang merupakan hasil kali matrik jarak antar objek penelitian dengan matrik transposenya. Secara sederhana.
- e. Tahap kelima adalah menentukan Pola Pembangunan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\pi_{i0} = \sqrt{\sum_{k=1}^m (\lambda_{ik} - \lambda_{0k})^2}$$

- f. Tahap keenam adalah menentukan Ukuran Pembangunan ( $\lambda_i^*$ ) yang memiliki nilai diantara nol (0) dan satu (1) atau dapat didefinisikan ( $0 \leq \lambda_i^* \leq 1$ ). Jika nilai dari Ukuran Pembangunan semakin mendekati satu, maka objek tersebut semakin tidak berkembang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

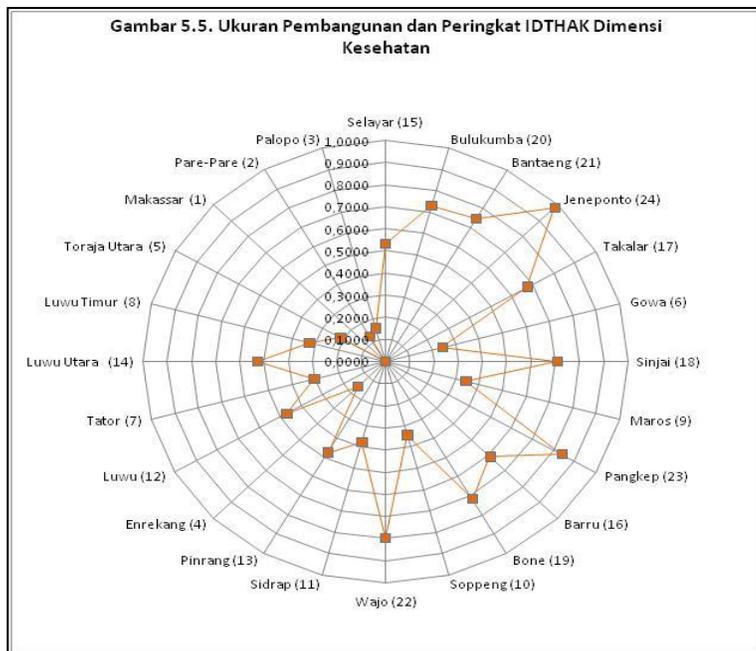
### Analisis Indeks Disparitas Tingkat Hidup Antar Kabupaten/Kota (IDTHAK)

Pada bagian ini, analisis ditujukan untuk membahas peringkat indeks disparitas tingkat hidup antar kabupaten/kota baik secara terpisah maupun menyeluruh. Secara terpisah penghitungan penghitungan disparitas tingkat hidup antar kabupaten/kota dibedakan atas 6 dimensi yaitu dimensi kesehatan, pendidikan, ekonomi, ketenagakerjaan, perumahan dan informasi dan teknologi. Indeks disparitas tingkat hidup antar kabupaten/kota baik secara terpisah maupun menyeluruh dihitung dari variable-variabel yang terdapat dalam setiap dimensi.

Dari 23 variabel yang digunakan untuk mengukur disparitas tingkat hidup dimensi sosial ekonomi, 16 diantaranya Kota Makassar menempati peringkat teratas, 3 variabel berada di posisi 2, 2 variabel berada di posisi 8, 1 variabel berada di posisi 19 dan 1 variabel berada di posisi 22. Dengan kondisi tersebut untuk keperluan analisis lebih lanjut Kota Makassar ditetapkan sebagai Kota model/acuan baik untuk penghitungan indeks disparitas tingkat hidup maupun disparitas PDRB.

**IDTHAK Dimensi Kesehatan**

*Gambar 2. Ukuran Pembangunan Dan Peringkat IDTHAK Dimeansi Kesehatan*



Sumber : Diolah dari Data Susenas 2014, BPS Sulawesi Selatan

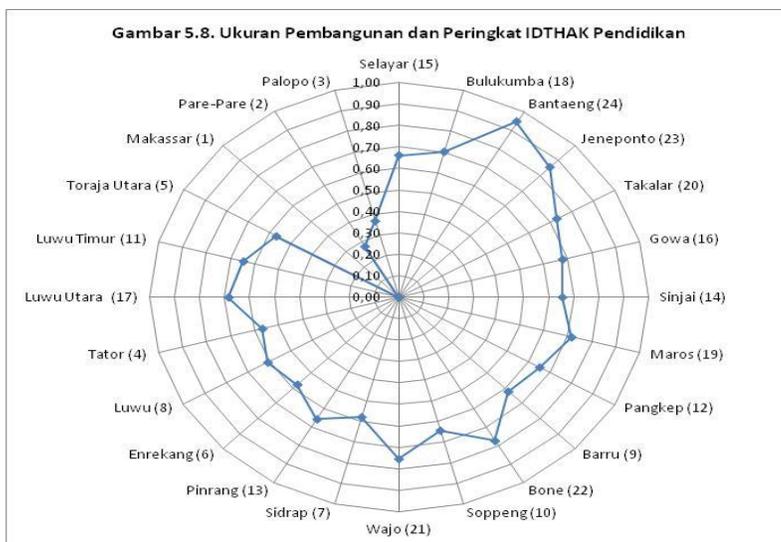
Keterangan :

Kode 1 s.d. 23 di belakang nama kabupaten/kota menunjukkan peringkat IDTHAK

Gambar 2, secara visual memperlihatkan sebaran kabupaten/kota menurut nilai ukuran pembangunan kesehatan yang terbagi dalam 10 radius. Pada radius 1 ditempati oleh Kota Makassar dan di radius 2 masing-masing ditempati oleh Kota Pare Pare, Palopo dan Enrekang. Keempat kabupaten/kota ini merupakan kabupaten/kota dengan pembangunan kesehatan yang lebih baik dari kabupaten lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Sementara pada radius 5 dan 6 atau radius terluar ditempati oleh Kabupaten Pangkep dan Jeneponto yang berarti pembangunan di bidang kesehatan kabupaten tersebut jauh tertinggal dibandingkan dengan daerah acuan, yaitu Kota Makassar.

**IDTHAK Dimensi Pendidikan**

**Gambar 3. Ukuran Pembangunan Dan Peringkat IDTHAK Pendidikan, 2014**



Sumber :Susenas 2014, BPS Sulawesi Selatan

Keterangan :

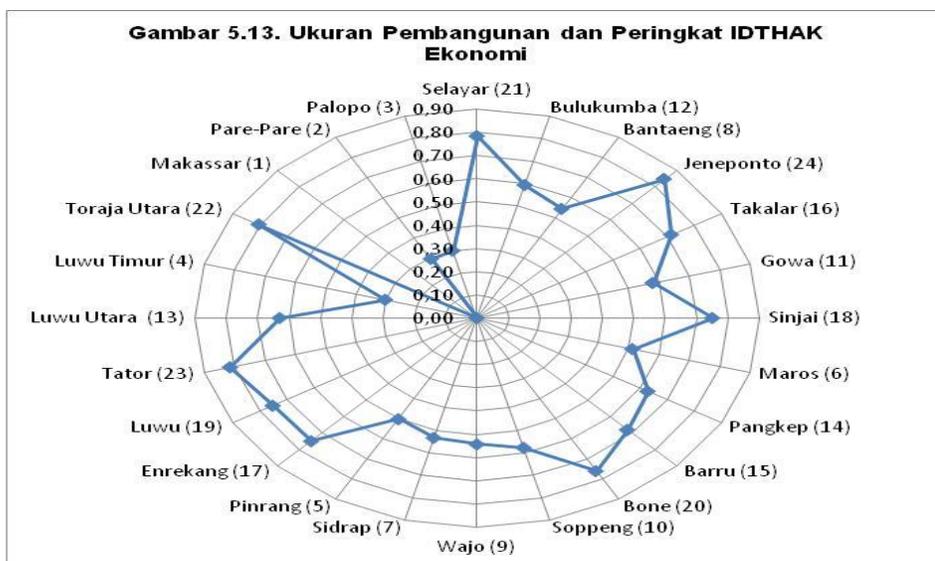
Kode 1 s.d. 23 di belakang nama kabupaten/kota menunjukkan peringkat IDTHAK

Dari Gambar 3 di atas, terlihat bahwa nilai ukuran pembangunan bidang pendidikan berada pada rentang skala 0,00 hingga 0,95 dan terbagi menjadi 10 radius jika menggunakan interval 0,10. Kota Makassar sebagai daerah acuan berada pada pusat radar, disusul posisi kedua ditempati oleh Kota Pare Pare yang berada pada radius 3 dan Kota Palopo di urutan ke tiga berada di radius 4. Radius yang paling luar ditempati oleh Kabupaten Jeneponto di radius 9 dan Bantaeng di radius 10.

Hal yang perlu diperhatikan adalah kondisi pendidikan Kabupaten Bantaeng. Sebagaimana diketahui bahwa Kabupaten Bantaeng dalam lima terakhir sangat fenomenal dalam pembangunan infrastrukturnya. Namun dengan melihat kondisi pendidikan di kabupaten tersebut mengindikasikan bahwa ternyata pembangunan tidak menyentuh lebih jauh untuk bidang pendidikan. Bahkan jika diamati lebih lanjut. Gambar3, ternyata kondisi pendidikan di Kabupaten bantaeng lebih buruk dari Kabupaten Jeneponto.

## IDTHAK Dimensi Ekonomi

Gambar 4. Ukuran Pembangunan Dan peringkat IDTHAK Ekonomi, 2014



Sumber :: IPM 2014 dan Susenas 2014, BPS Sulawesi Selatan

Keterangan :

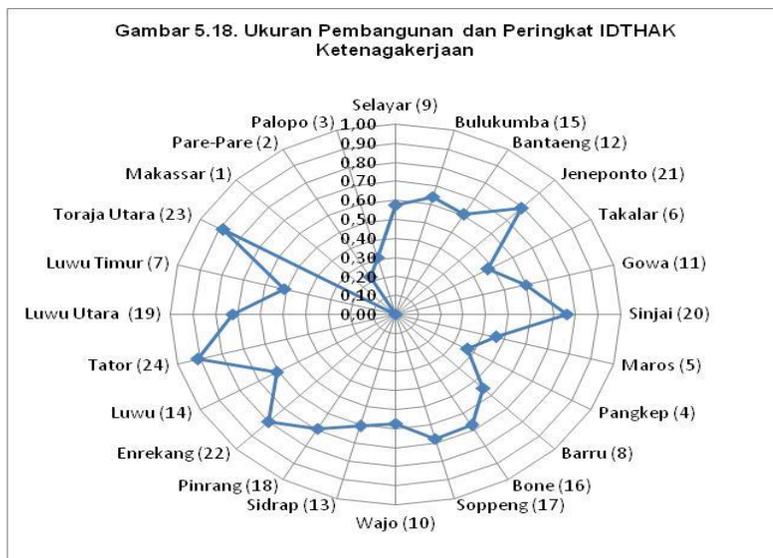
Kode 1 s.d. 23 di belakang nama kabupaten/kota menunjukkan peringkat IDTHAK

Dari Gambar 4 di atas, terlihat bahwa nilai ukuran pembangunan ekonomi berada pada rentang 0,00 hingga 0,90 dan terbagi menjadi 9 radius jika menggunakan interval 0,10. Kota Makassar sebagai kota acuan berada pada pusat radar. Pencapaian ekonomi berikutnya diraih oleh Kota Pare Pare kemudian di tempat ketiga adalah Kota Palopo. Sementara pada radius yang paling luar atau diurutkan 22-24 masing-masing ditempati oleh Kabupaten Tana Toraja, Toraja Utara dan Jeneponto.

Ketiga Kabupaten tersebut harus lebih optimal dalam mengelola sumberdaya alam dan sumberdaya manusia. Kabupaten Tana Toraja dan Tana Toraja ternyata belum mampu meningkatkan pendapatan daerahnya masih sama pada waktu kedua kabupaten tersebut belum mekar. Padahal tujuan pemekaran adalah lebih mengoptimalkan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakatnya. Sedang Kabupaten Jeneponto, kondisi ini masih terus berlanjut walaupun ada peningkatan dalam perolehan pendapatan daerah namun tidak signifikan. Hal ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah setempat untuk lebih mengoptimalkan segala sumberdaya di daerah Jeneponto.

## IDTHAK Dimensi Ketenagakerjaan

Gambar 5. Ukuran Pembangunan Dan Peringkat IDTHAK Ketenagakerjaan. 2014



Sumber :Sakernas 2014, BPS Sulawesi Selatan

Keterangan :

Kode 1s.d.23 di belakang nama kabupaten/kota menunjukkan peringkat IDTHAK

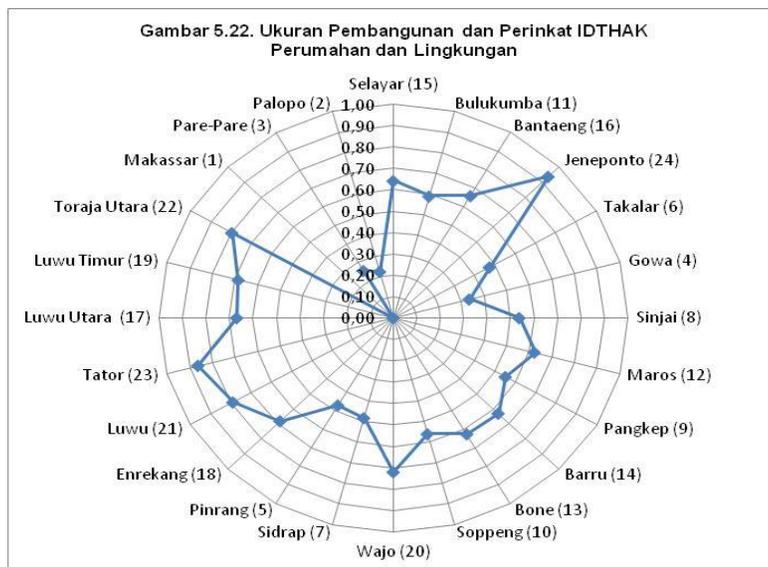
Gambar 5, terlihat bahwa nilai ukuran pembangunan bidang ketenagakerjaan berada pada rentang skala 0,00 hingga 1,00 dan terbagi menjadi 10 radius jika menggunakan interval 0,10. Kota Makassar sebagai daerah acuan, berada pada pusat radar. Pencapaian ketenagakerjaan terbaik berikutnya adalah Kota Pare Pare pada radius ketiga. Berikutnya adalah Kota Palopo yang berada pada radius keempat. Sementara pada radius terluas ditempati oleh Kabupaten Tana Toraja, Toraja Utara dan Enrekang.

Kondisi Kabupaten Tana Toraja, Toraja Utara dan Enrekang sebenarnya hamper sama pada semua kabupaten di Sulawesi Selatan yaitu dipengaruhi oleh variable masih tingginya persentase pekerja pada lapangan pekerjaan di sektor informal dan di sector pertanian.

## IDTHAK Dimensi Perumahan dan Lingkungan Hidup

Berdasarkan Gambar 6 di bawah, diketahui bahwa nilai ukuran pembangunan bidang perumahan dan lingkungan berada pada rentang 0,00 hingga 0,94. Ukuran pembangunan 0,00 dimiliki Kota Makassar sebagai daerah acuan sedangkan ukuran pembangunan 0,94 dimiliki oleh Kabupaten Jeneponto. Gambar 6 di bawah juga menunjukkan posisi Kabupaten Jeneponto sebagai daerah paling terbawah dalam hal pembangunan perumahan dan lingkungan ditunjukkan oleh nilai ukuran pembangunan yang berada pada posisi paling luar.

Gambar 6. Ukuran Pembangunan dan Peringkat IDTHAK Perumahan Dan LingkunganHidup, 2014



Sumber :Susenas 2014, BPS Sulawesi Selatan

Keterangan :

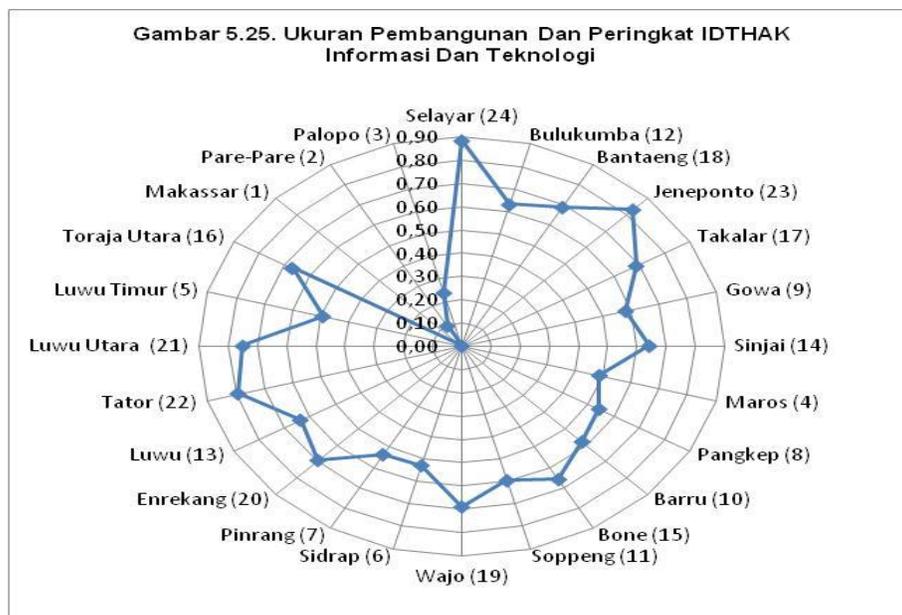
Kode 1 s.d. 23 di belakang nama kabupaten/kota menunjukkan peringkat IDTHAK

Lima Kabupaten dengan posisi terbawah dalam segi pembangunan perumahan adalah Kabupaten Wajo, Luwu, Torajautara, Toraja dan Jeneponto. Keadaan dikarenakan oleh variable tingginya persentase jenis dinding bukan tembok karena pada umumnya menggunakan kayu. Namun demikian harus diteliti lagi jenis dan kualitas kayu yang digunakan. Juga kondisi bahan kayu tersebut apakah masih baik atau tidak layak lagi.

Selain itu variabel yang mempengaruhi rendahnya kualitas hidup dari segi perumahan adalah akses terhadap fasilitas buang air besar yang belum banyak menggunakan fasilitas sendiri. Kemudian variabel yang mempengaruhi juga adalah tingginya persentase tempat pembuangan akhir hirtinja tidak menggunakan tangki septic sehingga menggambarkan jika kelima kabupaten tersebut sangat jauh tertinggal dalam hal perumahan dan lingkungan hidup.

## IDTHAK Dimensi Informasi Dan Teknologi

Gambar 7. Ukuran Pembangunan Dan Peringkat IDTHAK Informasi Dan Teknologi, 2014



Sumber : Susenar 2014, BPS Sulawesi Selatan

Keterangan :

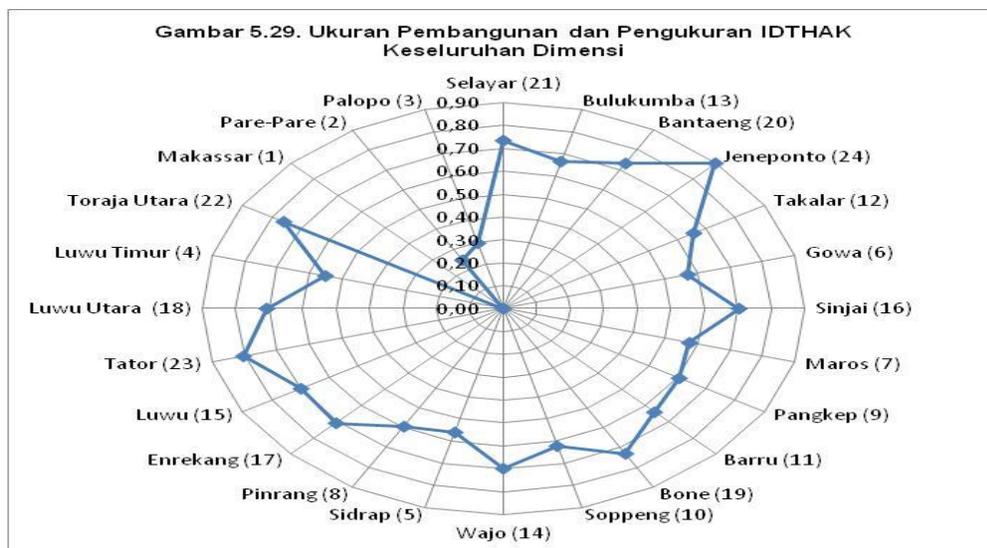
Kode 1 s.d. 23 di belakang nama kabupaten/kota menunjukkan peringkat IDTHAK

Informasi dan teknologi adalah bagian dari gaya hidup dan gaya hidup biasanya terkait dengan kemampuan ekonomi penduduk, maka untuk meningkatkan akses terhadap informasi dan teknologi salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan upaya meningkatkan perekonomian penduduk yang disertai dengan pembangunan sarana prasarana untuk memudahkan akses penduduk menjangkau informasi dan teknologi.

Dari Gambar 7 di atas, dapat diketahui bahwa nilai ukuran pembangunan dimensi informasi dan teknologi berada pada kisaran rentang skala 0,00 hingga 0,88 terdiri dari Sembilan radius. Nilai ukuran pembangunan dimiliki oleh Kabupaten Selayar yaitu 0,88, ini menunjukkan bahwa Kabupaten Selayar mengalami ketertinggalan pembangunan bidang informasi dan teknologi ditandai dengan posisi nilai ukuran pembangunan paling jauh dari Kota Makassar. Ketertinggalan Kabupaten Selayar, Jeneponto, Tana Toraja, Toraja Utara dan Enrekang lebih dipengaruhi oleh masih rendahnya variable penduduk usia 10 tahun keatas yang mengakses internet 3 bulan terakhir.

## IDTHAK Seluruh Dimensi

Gambar 8. Ukuran Pembangunan Dan Peringkat IDTHAK Keseluruhan Dimensi, 2014



Sumber : Susenas 2014, BPS Sulawesi Selatan

Keterangan :

Kode 1 s.d. 23 di belakang nama kabupaten/kota menunjukkan peringkat IDTHAK

Setelah diperoleh alat ukur per dimensi, pengolahan kemudian dilanjutkan untuk mengukur IDTHAK keseluruhan dimensi dengan menggunakan 23 variabel dengan menggunakan metode taksonomik dan hasilnya dapat dilihat pada Gambar 8. Berdasarkan Gambar 8 di atas, diketahui bahwa nilai ukuran pembangunan keseluruhan dimensi tingkat hidup berada pada rentang skala 0,00 hingga 0,90. Pusat radar adalah Kota Makassar sebagai daerah acuan dengan nilai ukuran pembangunan 0,00. Semakin jauh kabupaten/kota dari pusat radar maka diasumsikan semakin tertinggal kabupaten/kota tersebut dalam hal tingkat hidup. Kota Pare Pare menempati urutan kedua dengan berada pada radius ketiga sedang Kota Palopo berada pada radius keempat menempel pada batas luar radius ketiga. Walaupun Kota Pare Pare dan Palopo berada pada posisi kedua dan ketiga dalam nilai ukuran pembangunan namun relatif cukup jauh jaraknya dari pusat radius yaitu Kota Makassar sebagai acuan. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa analisis berdasarkan pengamatan secara langsung terhadap nilai ukuran pembangunan lebih sensitive bila dibandingkan nilai peringkat IDTHAK karena nilai peringkat tidak mengandung intensitas nilai jarak yang sesungguhnya terhadap acuan.

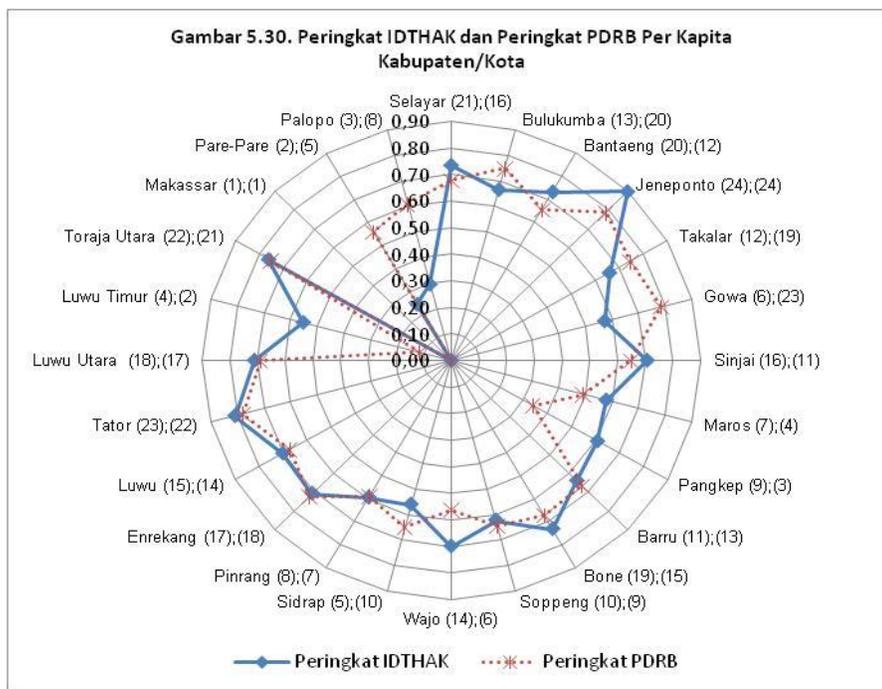
Lebih lanjut Gambar 8 di atas, juga menunjukkan bahwa kabupaten-kabupaten lain terletak antara radius kelima hingga ketujuh. Sedang pada radius terluar yaitu delapan dan Sembilan adalah Kabupaten Tana Toraja dan Jeneponto. Keadaan ini menunjukkan bahwa pembangunan antar kabupaten/kota sangat tidak merata atau relatif sangat tertinggal dari Kota Makassar dalam hal keseluruhan dimensi pembangunan karena nilai ukurannya berada pada posisi radius yang relatif sangat jauh dari Kota Makassar. Lebih menarik lagi ternyata kabupaten-kabupaten yang berada di sekitar Kota Makassar ternyata nilai ukuran pembangunannya tidak terlalu baik. Contoh, Kabupaten Gowa yang relatif sangat dekat dengan

Kota Makassar namun nilai ukuran pembangunannya masih jauh tertinggal karena berada pada radius keenam walaupun dalam hal IDTHAK keseluruhan dimensi Kabupaten Gowa berada pada posisi keenam. Hal sama juga terjadi untuk Kabupaten Maros dan Takalar dimana kabupaten-kabupaten tersebut nilai ukuran pembangunannya berada pada radius 6 dan 7 dengan peringkat IDTHAK untuk keseluruhan dimensi pembangunan berada pada urutan 7 dan 12.

Analisis selanjutnya dilakukan dengan mengamati secara bersama-sama antara peringkat IDTHAK dibandingkan dengan peringkat PDRB per kapita. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah daerah-daerah yang memiliki potensi perekonomian baik (PDRB per kapita tinggi) juga memiliki tingkat hidup yang baik.

Gambar 9 di bawah, menampilkan sebaran peringkat IDTHAK keseluruhan dimensi dibandingkan dengan peringkat PDRB per kapita untuk tiap-tiap kabupaten/kota. Posisi ideal suatu daerah adalah jika kabupaten/kota tersebut mampu mengoptimalkan potensi perekonomiannya untuk mencapai tingkat hidup yang maksimal atau paling tidak tingkat hidup penduduk seirama dengan potensi perekonomian yang dimiliki (IDTHAK lebih baik dari peringkat PDRB per kapita).

Gambar 9. Peringkat IDTHAK Dan Peringkat PDRB PerKapitaKabupaten/Kota, 2014



Sumber :Susenas 2014, BPS Sulawesi Selatan

Keterangan :

Kode 1 s.d. 23 di belakang nama kabupaten/kota menunjukkan peringkat IDTHAK

Pada Gambar 9 di atas, di atas menyajikan lima kabupaten/kota terbaik IDTHAK yang secara berturut-turut ditempati oleh Kota Makassar, Kota Pare Pare, Kota Palopo, Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Sidrap. Dari Gambar 9, juga nampak bahwa terwujudnya IDTHAK

di Kabupaten Luwu Timur ternyata belum mampu mengangkat tingkat hidup masyarakat secara maksimal. Ini ditandai dengan melihat peringkat PDRB Kabupaten Luwu Timur di posisi kedua namun peringkat IDTHAK menduduki peringkat keempat. Sedang untuk Kota Pare-Pare, Palopo dan Kabupaten Sidrap walaupun peringkat PDRB menempati posisi kelima, kedelapan dan kesepuluh tapi mampu mengoptimalkan potensi perekonomiannya karena walaupun dengan peringkat lima ke bawah mampu mewujudkan tingkat hidup yang baik.

Kondisi Kabupaten Luwu Timur juga dialami oleh Kabupaten Maros dan Pangkep. Posisi peringkat PDRB untuk Kabupaten Pangkep berada di posisi ketiga namun dalam hal mewujudkan IDTHAK yang baik belum mampu mengoptimalkan potensi perekonomiannya dengan ditandai peringkat IDTHAK menempati posisi sembilan. Begitu pula dengan Kabupaten Maros, walaupun peringkat PDRB berada di posisi 4 (empat) namun dalam hal IDTHAK menempati posisi 7 (tujuh). Dari semua kabupaten/kota yang peringkat IDTHAK berada diluar radius dibandingkan dengan peringkat PDRBnya maka Kabupaten Luwu Timur yang menunjukkan posisi IDTHAK dan PDRB yang paling ekstrim karena PDRBnya berada pada radius kedua namun IDTHAK erada pada radius keenam. (Lihat Gambar 9)

## **SIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan penelitian seperti yang disampaikan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa dimensi kesehatan, dimensi pendidikan, dimensi ketangakerjaan, dimensi ekonomi, dimenasi perumahan dan lingkungan hidup serta dimensi infrmasi dan teknologi dengan menggunakan 23 variabel dapat digunakan untuk analisis Disparitas Tingkat Hidup Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan.
2. IDTHAK dimensi keseluruhan yang diukur dengan menggunakan 23 (dua puluh tiga variabel) menempatkan Kota Makassar, Pare Pare dan Palopo sebagai tiga peringkat teratas. Sedang Kabupaten Toraja Utara, Tana Toraja dan Jeneponto merupakan tiga kabupaten yang menempati posisi terbawah IDTHAK dimensi keseluruhan.
3. Walaupun Kabupaten Luwu Timur dan Sidrap menempati posisi empat dan lima IDTHAK dimensi keseluruhan namun demikian bila diukur pola pembangunannya relatif tertinggal dari Kota Makassar.
4. Posisi ideal suatu kabupaten/kota adalah jika mampu mengoptimalkan potensi perekonomiannya untuk mewujudkan tingkat hidup yang maksimal atau paling tidak tingkat hidup penduduk seirama dengan potensi perekonomian yang dimilikinya. Kota Pare Pare dan Palopo merupakan dua kota yang paling optimal dalam memanfaatkan sumber perkonomian (PDRB) dalam pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan penduduknya., Sedang Kabupaten Gowa, Takalar, Bulukumba dan Sidrap juga sudah efektif menggunakan sumber perekonomian (PDRB) untuk pembangunan tetapi belum optimal.
5. Kabupaten Luwu Timur merupakan kabupaten yang menempati urutan kedua dalam hal PDRB perkapita namun jika dilihat dalam peringkat IDTHAK seluruh dimensi menempati posisi ke empat ini mengindikasikan jika pemanfaatan sumber perekonomian di Kabupaten Luwu Timur sangat tidak optimal. Begitu pula yang terjadi di Kabupaten Pangkep, Wajo, Maros, Bantaeng dan Jeneponto.

## REFERENSI

- B.B. Bhattacharya And S. Sakhivel, Regional Growth And Disparity in India : A Comparison Of Pre And Post-Reform Decades download dari internet tanggal 16 Nopember 2015
- BPS RI, Analisis Disparitas Tingkat Hidup Antar Provinsi, Katalog BPS 4102012
- BPS Provinsi Sulawesi Selatan, *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013, Katalog BPS : 9302001.73*
- BPS Provinsi Sulawesi Selatan, *Indikator Makro Sosial Ekonomi Sulawesi Selatan Triwulan I 2015, Katalog BPS : 1103005.73*
- Christian Leßmann, 2006. "Fiscal Decentralization and Regional Disparity: A Panel Data Approach for OECD Countries," Ifo Working Paper Series Ifo Working Papers No. 25, Ifo Institute for Economic Research at the University of Munich.
- Dolan, Paul (2008) [Developing methods that really do value the 'Q' in the QALY](#) *Health Economics, Policy and Law*, 3 (01). 69-77. ISSN 1744-1331
- Grabiński, T.: *Metody taksonometrii*. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1992.
- Gunnar Myrdal (1957) Economic Theory and Underdeveloped Regions*, Gerald Duckworth, 1957.
- Hellwig, Z.: *Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów z uwzględnieniem poziomu rozwoju oraz zasady i struktury wykształcenia kadry*, *Przegląd Statystyczny*, nr 4, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1968. ISSN 0033-2372.
- Kuznets, S. 1955. "Economic Growth and Income Inequality". *The American Economic Review*, 45: 1-28.
- Louis Tay and Ed Diener, *Journal of Personality and Social Psychology*, Needs and Subjective Well-Being Around the World 2011, Vol. 101, No. 2, 354–365.
- Marta Kuc, *The application of different synthetic measures for standard of living measurement (2012)*
- Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2013-2018.
- UNDP (1996). *Human Development Report*. New York: Oxford University Press.
- UNDP (1997). *Human Development Report*. New York: Oxford University Press.
- UNDP (2002). *Human Development Report*. New York: Oxford University Press.
- Sen, A. (1987): *The Standard of Living*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Todaro, Michael P. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Edisi 7. Jakarta. Erlangga.
- World Bank (2000), 'poverty is pronounced deprivation in well being', Zeliaś, A., Malina, A.: *O budowie taksonomicznej miary jakości życia.*, „Taksonomia”, z. 4. Wrocław, 1994. ISBN 83-7011-138-6.

Zeliaś, A.: *Taksonomic znaanal izaprze strzennegoz różnico wania poziomużycia w Polsce w ujęciu dynamic znym*. Kraków: Wydawnictwo AE, 2002. ISBN: 83-7252-065-8.

Zhiceng Liang (2005) Financial Development, Market Deregulation and Growth: Evidence from China, download dari internet tanggal 16 Nopember 2015